

## **BAB II**

# **IMPLEMENTASI NILAI KONFUSIANISME DALAM POLITIK CHINA DARI ERA MAO ZEDONG HINGGA XI JINPING**

Dalam bab ini, penulis akan memfokuskan pembahasan pada implementasi nilai konfusianisme dalam pengambilan kebijakan politik China. Penulis ingin menunjukkan bagaimana konfusianisme mempengaruhi perpolitikan China baik dalam negeri, maupun luar negeri. Bab ini akan menjelaskan nilai-nilai politik konfusianisme serta implementasi nilai tersebut dalam kebijakan politik China dari masa pemerintahan Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, hingga Xi Jinping.

### **A. Nilai-nilai Politik Konfusianisme**

Konfusianisme mengajarkan banyak hal dalam lini kehidupan bangsa China, termasuk dalam kehidupan politik. Namun, penulis hanya akan memfokuskan pada kehidupan politik era komunisme karena sebelum era komunisme, konfusianisme bertolak belakang dengan China saat ini. Dalam kehidupan politik China, konfusianisme mengatur filsafat politik yang ada dalam internal pemerintahan China dan pemimpin China.

Menurut Yang Chung-fang, terdapat hubungan historis antara kegiatan politik China pada sekarang ini dengan kerajaan-kerajaan China di masa lampau. Hal itu dipengaruhi oleh konfusianisme yang menjadi nilai dasar China dalam menjalin hubungan politik. Konfusianisme beranggapan bahwa individu sebagai bagian penting dalam mencapai tujuan kelompok (Danardono, 1999: 8).

Pasca penyatuan negara-negara kecil oleh dinasti Qing, muncul istilah *xiaowo* (kepentingan pribadi) dan *dawo* (kepentingan kelompok) sebagai bentuk modifikasi konsep-konsep konfusianisme dengan konsep-konsep *legalisme*. Untuk mendukung dua konsep kunci interaksi sosial tersebut, dalam konfusianisme juga dikembangkan

lima nilai yaitu *ren* (kebajikan), *li* (kesopanan; adat istiadat), *yi* (kemasuk-akalan), *zhong* (loyalitas), dan *shu* (empati) (Soetjipto, 1990).

*Ren* ditandai dengan hubungan dua orang. Dalam mencapai *ren*, seorang harus berlaku seperti *li*. Disisi lain, *li* harus diimbangi dengan *yi* untuk membentuk pola interaksi yang tidak kaku. Untuk mencapai *ren*, kadang-kadang memerlukan *zhong* dan *shu*. Keduanya menjadi tolak ukur ketercapaian *ren*. Keduanya akan membuat orang yakin bahwa ia telah melakukan sesuatu untuk orang lain seperti kepada dirinya sendiri, serta membuat orang berusaha untuk mengetahui kebutuhan orang lain dan akan membantunya. Begitulah konfusianisme berperan dalam mencapai kerajaan yang harmoni oleh pemimpin yang bijak (Yu-Lan, 2007).

Konfusianisme memandang kerajaan atau seyogyanya negara harus memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

- 1) Mengadvokasi “seluruh dunia sebagai satu komunitas”.
- 2) Memili “manusia yang bijaksana dan memiliki kemampuan” untuk memerintah.
- 3) Menjaga hubungan dekat dan persatuan dengan negara tetangga berdasarkan “kepercayaan dan persahabatan”.
- 4) Orang tua menikmati sisa hidup mereka, orang paruh baya memiliki pekerjaan, anak-anak menerima pendidikan yang layak, dan duda, janda, anak yatim dan orang-orang terisolasi dirawat dengan baik.
- 5) Hak menikah untuk semua laki-laki dan wanita.
- 6) Bahkan jika seseorang benci melihat uang atau barang yang dilemparkan ke tanah, dia tidak boleh menyimpannya sebagai miliknya sendiri, bahkan jika dia benci melihat pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain, dia tidak boleh melakukannya untuk kepentingannya sendiri.

- 7) Tidak ada penghianatan, tidak ada pencurian, tidak ada pemberontakan.
- 8) Pintu tidak terkunci pada malam hari (Krieger & Trauzettel, 1991: 15).

Konfusianisme menekankan pada konsepsi bahwa pemimpin China memiliki tanggungjawab untuk menjaga perdamaian dunia dan kestabilan keamanan. Konsepsi tersebut berdasarkan pada asas China bahwa semua warga manusia memiliki nasib yang sama di dunia, yang disebut *all-under-heaven* atau *tianxia*. Nilai-nilai konfusianisme kemudian berkembang dan masuk dalam pengambilan kebijakan politik China (Bell, 2008).

## **B. Implementasi Nilai Konfusianisme dalam Kebijakan Politik China**

Konfusianisme memegang peranan penting dalam perpolitikan China. Nilai-nilai yang sudah terinternalisasi menjadi budaya China menjadikan China dikenal dengan negara Konfusian. Sehingga, kebijakan politik yang diambil secara tanpa sadar merefleksikan nilai Konfusianisme China. Meskipun konfusianisme pernah mengalami degradasi nilai pada masa Mao Zedong, namun kembali bangkit pada masa Deng Xiaoping. Berikut merupakan integrasi nilai konfusianisme dalam kebijakan politik China mulai dari era Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, hingga Xi Jinping.

### **a. Pemerintahan Era Mao Zedong**

Pada saat pemerintahan Mao Zedong, konfusianisme mengalami degradasi nilai. Mao Zedong berupaya untuk menghapuskan nilai-nilai konfusianisme dari masyarakat China. Hal tersebut berbeda dengan orientasi politiknya saat masih muda yang mendukung nilai konfusianisme.

Pembaharu Konfusianisme Kang Youwei merupakan seorang panutan Mao Zedong saat ia muda. Kang menulis buku yang berjudul *the Great Harmony* dan hanya terbit satu kali pada tahun 1935. Buku tersebut menjelaskan

bahwa perkembangan dunia dibagi mejadi tiga tingkatan, yaitu *uncivilized stage*, *intermediate stage*, dan *Great Harmony* (perdamaian dunia).

Kang mendeksripsikan masyarakat ideal terdiri dari masyarakat yang bebas dari keterkaitan tertentu dan saling berbagi: “Memiliki negara, keluarga, dan individu berarti mengizinkan setiap orang memelihara lingkungan keegoisan .... Oleh karena itu, tidak hanya negara yang harus dihapuskan, agar tidak akan ada lagi perjuangan antara yang kuat dan yang lemah; keluarga juga harus disingkirkan, agar tidak ada lagi ketidaksetaraan cinta dan kasih sayang di antara orang-orang; dan akhirnya keegoisan itu sendiri harus dihapuskan, agar barang dan jasa tidak akan digunakan untuk tujuan pribadi ... Satu-satunya cara yang benar adalah berbagi dunia yang sama oleh semua orang (*tian xia wei gong*)”. Kemudian, pemikiran menarik lainnya muncul dari murid Kang yaitu Liang Qichao yang mengatakan bahwa masyarakat China tidak pernah menganggap pemerintah nasional sebagai bentuk organisasi sosial tertinggi. Pemikiran politik mereka selalu dalam hal seluruh umat manusia, dengan perdamaian dunia sebagai tujuan akhir, dan keluarga dan bangsa sebagai tahap peralihan dalam penyempurnaan perdamaian dunia atau *tian xia* (Bell, 2008: 40-42).

Banyak pemimpin China pada pergantian abad ke-20 yang setuju dengan nilai tersebut. Misalnya, Sun Yat-sen yang menerima syarat Kang untuk mengganti *East West School* menjadi sekolah Da Tong dengan semboyan *tian xia wei gong*. Pada tahun 1917, Mao muda menulis pesan kepada temannya Li Jinxi bahwa “Da Tong adalah tujuan kita” (Bell, 2008: 41). Ia pun pernah menawarkan ideologi “sinifikasi marxisme” untuk diterapkan dalam Partai Komunis China (PKC) pada tahun 1938. Ide tersebut menggabungkan antara sosialisme dengan karakteristik China, seperti budaya, sastra, dan lainnya. Namun, ide tersebut ditolak mentah-mentah oleh para pejabat tinggi partai, oleh karena dianggap tidak relevan

dengan ajaran Marxisme-Leninisme yang mereka percayai (Wylie, 1979).

Tujuan Mao muda pun berubah ketika ia menjadi penguasa China pada tahun 1949 hingga tahun 1976. Ia mengadopsi nilai komunisme Uni Soviet dan melakukan banyak perombakan pada pemerintahan China. Nilai konfusianisme mengalami penurunan pada masa Mao Zedong, dan dianggap sudah tidak relevan.

Ideologi Partai Komunis China berbeda dengan konfusianisme. Para pakar Komunis China menginterpretasikan sejarah peran Konfusianisme dalam masyarakat China menggunakan teori Marxis tentang materialisme dialektis dan materialisme sejarah. Materialisme dialektis merupakan perpanjangan dari dialektis Hegel yang berfokus pada pemikiran manusia. Marxis kemudian menggunakan dialektis tersebut untuk menganalisa materi. Proses dialektis<sup>1</sup> coba diterapkan Marxisme dalam menganalisa sejarah ekonomi Eropa, yang akan dijelaskan dalam materialisme sejarah.

Oleh karena materialisme Marxis hanya berpaku pada ekonomi, maka materialisme sejarah menjelaskan tentang analisis ekonomi terhadap sejarah. Marxis mengungkapkan bahwa analisis ekonomi sejarah telah menciptakan dua kelas masyarakat, yaitu kelas budak dan kelas pemilik modal. Kelas budak secara dialektis berubah menjadi masyarakat feodal, kemudian akan berubah menjadi masyarakat kapitalis dikarenakan pertentangan antara kelas pemilik tanah dan kelas penggarap tanah. Masyarakat kapitalis memunculkan pertentangan antara kaum kapitalis dan kaum proletar

---

<sup>1</sup> Proses dialektis terdiri dari konsep tesis dan antitesis yang kemudian memunculkan konsep sintesis sebagai kumpulan kontradiksi-kontradiksi dari tesis dan antitesis. Pola tersebut akan terus berubah hingga mencapai kebenaran tertinggi yang disebut sebagai Ide Mutlak. Perkembangan dialektis akan berhenti ketika tidak ada lagi kebenaran tertinggi dari sintesis sebelumnya.

yang kemudian merubah masyarakat kapitalis menjadi masyarakat komunis. Marxis percaya bahwa masyarakat komunis merupakan strata kebenaran sosial tertinggi (Budiardjo, 2008).

Berdasarkan teori tersebut, para pakar menyimpulkan bahwa konfusianisme merupakan ideologi politik yang tumbuh dari hubungan kelas dalam masyarakat feodal dan ajaran moral Konfusian serta teori-teori politik digunakan untuk melayani kepentingan kelas penguasa, atau kelas “pemilik budak”, dengan membenarkan sistem kepemilikan yang memastikan dominasi kelas tersebut. Berangkat dari teori perjuangan kelas, Marxis menolak prinsip dasar konfusianisme tersebut. Ia bahkan enggan untuk menerapkan sistem “pemerintahan yang bijak” yang diusung oleh pemikir Konfusian, karena pemerintahan tersebut hanya menghendaki konsep hirarki yang kuat dan memenuhi unsur konfusianisme di atas (Krieger & Trauzettel, 1991: 236). Perbedaan tersebut yang kemudian mendorong Mao Zedong untuk menghapuskan nilai-nilai konfusianisme pada masa kepemimpinannya.

Setidaknya terdapat tiga periode yang menunjukkan orientasi politik China terkait konfusianisme pada masa pemerintahan Mao Zedong. Pertama, kebijakan utama pada tahun 1949 hingga tahun 1964 disebut “critical inheritance”. Kebijakan tersebut bermaksud untuk menghapuskan nilai-nilai konfusianisme yang tidak sesuai dengan Marxisme, dan hanya mengadopsi nilai-nilai yang berguna untuk membangun masyarakat sosialis. Kedua, kebijakan revolusi budaya yang terjadi pada tahun 1965 hingga tahun 1976 memiliki orientasi politik yang disebut “complete severance”. Hal tersebut bertujuan untuk menghapuskan seluruh ajaran konfusianisme dari masyarakat China. Ketiga, bersamaan dengan kematian Mao Zedong pada bulan September 1976 dan gugurnya *Gang of Four* (Jiangqing, Zhang Chungqiao, Wang Hungwen, dan Yao Wenjuan),

kebijakan politik China kembali kepada “critical inheritance” (Krieger & Trauzettel, 1991: 235).

Pada periode pertama, Mao Zedong menerapkan sistem pembangunan ala Soviet yang berbeda dengan semangat konfusianisme, yang dimulai dari reformasi agraria dan *the Great Leap Forward*. Reformasi agraria merupakan ekspansi tanah subur dan pertanian kolektif. Tanah subur yang berada di China telah digunakan sebagai area pemakaman, sehingga pemerintah perlu menggali dan memindahkan makam ke area lain. Sedangkan pertanian kolektif mengadopsi nilai-nilai komunisme yang bertumpu pada kebersamaan. Pemerintah mengelola tanah dan membagikannya secara merata kepada para petani, lalu petani tersebut dibebaskan untuk mengolah tanah tersebut. Tujuan utama dari reformasi agraria yaitu untuk memperoleh pemerataan dengan prinsip egalitarianisme yang sering diungkapkan oleh Mao Zedong (Bromley & Yao, 2006: 88-90).

Berakhirnya reformasi agraria, pada tahun 1957, sekelompok penganut Marxis Ortodoks memperoleh persetujuan Mao untuk memulai program tiga tahun percepatan produksi baja, batu bara, dan tenaga listrik dalam negeri, yang dikenal sebagai *the Great Leap Forward*. Program yang mereka tawarkan adalah penggalian dan terasering gunung untuk membuka pertambangan, sehingga dibutuhkan pekerja dalam jumlah besar. Menjelang musim gugur 1958, jutaan orang berpartisipasi dalam proyek ini, banyak dari mereka yang berasal dari daerah pedesaan. Sekitar 600.000 tungku pembuatan baja disediakan dan sekitar 11 juta ton besi dan baja diproduksi (Kornberg & Faust, 2005: 32-33).

Namun, akibat dari *the Great Leap Forward* yaitu pertanian menjadi terbengkalai. Disisi lain, produksi besi dan baja yang dihasilkan belum dapat digunakan sebagai bahan baku industri. China tidak memiliki peralatan dan tenaga ahli untuk memenuhi standar bahan baku industri

tersebut. Sehingga, baja dan besi yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Banyak pihak mulai mengkritisi proyek ini karena tidak sesuai dengan kebutuhan China saat ini. Setelah tiga tahun berjalan dari tahun 1958 hingga tahun 1961, *the Great Leap Forward* dinilai gagal karena menimbulkan kelaparan selama tiga tahun. Sebanyak jutaan orang meninggal karena kelaparan dalam kurun waktu tersebut (Ho, 2004: 58-61).

Kedua kebijakan di atas mengindikasikan bahwa Mao Zedong benar melakukan pembersihan pada ajaran konfusianisme. Ia tidak mencantumkan nilai konfusianisme dalam kebijakan Reformasi agraria dan *the Great Leap Forward*. Kedua kebijakan tersebut dijalankan sama persis dengan proses pembangunan di Soviet, sehingga hasilnya gagal karena tidak sesuai dengan budaya masyarakat China. Reformasi agraria menghapuskan kepemilikan pribadi terhadap tanah sementara konfusianisme mendorong terciptanya kepemilikan pribadi. Dalam sejarah China, konfusianisme menciptakan masyarakat agraria yang menekankan pada kerjakeras, penghematan, harmoni sosial, kepemilikan pribadi, dan pemerataan kekayaan, berbeda dengan masyarakat industri yang diinginkan oleh Mao Zedong (Krieger & Trauzettel, 1991: 241). Meskipun ajaran konfusianisme tidak digunakan dalam pengambilan kebijakan, namun ajaran tersebut berkembang aktif dalam sistem pendidikan di China.

Pada periode kedua, Mao Zedong menerapkan kebijakan “complete severance” yang bertujuan untuk menghapuskan Konfusianisme dari akarnya melalui gerakan revolusi budaya. Revolusi Budaya berawal dari ketakutan Mao Zedong bahwa ia akan digulingkan seperti dinasti-dinasti sebelumnya. Hidup pada masa Kerajaan, Mao mengembangkan ketertarikannya pada sejarah China, khususnya kehidupan kasiar-kaisar sebelumnya. Ia menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari *The History of the Twenty Four Dynasties*. Ia kemudian



menemukan fakta bahwa dalam kurun waktu 400 tahun, tiga kaisar digulingkan oleh kelompok pemberontak. Singkatnya, pergantian kerajaan di China selalu melalui cara pemberontakan yang menginginkan perubahan. Hal tersebut menimbulkan kegelisahan dalam diri Mao (Ho, 2004).

Sejatinya, penggulingan kekuasaan tersebut telah tercatat dalam budaya China. Kebijakan kolektif tentang kontinuitas dan perubahan tersebut dituliskan, dijelaskan, dan diperluas menjadi sebuah klasik kuno yang disebut Yi Jing, atau disebut juga Buku Perubahan. Buku ini dapat dikatakan sebagai asal mula filsafat peradaban dan budaya China dengan gagasan dan cita-cita yang telah mempengaruhi pemikiran China, khususnya Konfusianisme. Konfusianisme disebut sebagai pewaris juga penafsir Yi. Dalam konteks ini, Konfusianisme memberikan dasar filosofis dan historis untuk kontinuitas dan perubahan dalam sejarah panjang China (Yu-Lan, 2007).

Di dalam Yi, dijelaskan bahwa ketika segala sesuatu berjalan dengan ekstrem, maka mereka akan kembali ke yang lain. Seperti yang dinyatakan bahwa "*Things cannot be done away forever. When decadence and overthrow have completed their work at one end, reintegration commences at the other. . .*". Sistem tersebut juga dijelaskan dalam cerita sejarah *The Romance of the Three Kingdoms* yang mengatakan "Dalam urusan di bawah surga, bila terpecah terlalu lama akan bersatu, bila dipersatukan terlalu lama akan terpecah" (Krieger & Trauzettel, 1991: 309). Nilai tersebut telah terinternalisasi dalam masyarakat China bersamaan dengan budaya China.

Hal tersebut memunculkan kegelisahan Mao bahwa ia akan digulingkan baik oleh Jeneral yang ambisius atau pemimpin Partai Komunis. Demi menjaga kekuasaannya, Mao mengolah dukungan rakyat melalui pengabdian atau pemujaan kepada dirinya dan mengembangkan sebuah

layanan rahasia. Layanan rahasia tersebut ditujukan untuk memberantas para pemberontak.

Pemberontakan mulai terlihat dalam pemerintahan Mao, serta masyarakat China mulai dimobilisasi oleh Deng melalui ajaran Konfusius tentang perubahan dan kontinuitas. Masyarakat China percaya bahwa saat ini dibutuhkan perubahan dalam pemerintahan China. Menanggapi hal tersebut, Mao Zedong melancarkan gerakan revolusi budaya yang dimulai pada tahun 1966 hingga 1976. Revolusi budaya memiliki tujuan pasti untuk menghapuskan ajaran konfusianisme dan budaya China lainnya sampai ke akar-akarnya (Kornberg & Faust, 2005).

Mao kemudian membentuk *Gang of Four* untuk melancarkan revolusi budaya, serta memobilisasi pelajar dan mahasiswa dalam gerakan *Red Guards* untuk mengkampanyekan pengembalian Marxisme-Leninisme dengan menghancurkan idealisme lama China, adat kebiasaan, dan budaya China, termasuk konfusianisme. Mereka memulai dengan menghancurkan candi, monumen, dan museum. Kemudian mereka berhenti bersekolah dan menentang guru.

Namun, revolusi budaya berakhir dengan distorsi nilai China, serta menimbulkan kebingungan dalam masyarakat China apakah mereka harus tunduk kepada penguasa atau menjaga hubungan lainnya. Dalam ajaran konfusianisme, terdapat lima pola hubungan yang mengindikasikan terciptanya masyarakat yang harmonis yaitu polah hubungan antara penguasa dan rakyat, antara istri dan suami, antara anak laki-laki dan ayah, antara adik laki-laki dan kakak laki-laki, dan pola hubungan setara antarteman. Kelima pola tersebut menunjukkan pola hirarki bahwa posisi yang lebih rendah harus tunduk kepada posisi yang lebih tinggi.

Sementara yang terjadi di China, terdapat kebingungan dalam menjaga pola hubungan tersebut. Hal itu dikarenakan masyarakat harus tunduk pada Mao tapi

mereka juga harus menghormati guru mereka. Sebab dalam revolusi budaya, banyak murid yang menentang guru karena ingin menghapuskan ajaran agama. Sehingga revolusi budaya gagal dijalankan di China.

Berakhirnya revolusi budaya, ditandai dengan runtuhnya *Gang of Four* dan meninggalnya Mao Zedong. Masyarakat China menginginkan gerakan pembaharuan dengan menghidupkan kembali budaya China termasuk filsafat China seperti Konfusianisme. Pada akhirnya, ramalan Konfusianisme benar terjadi bahwa perubahan dan kontinuitas akan selalu terjadi dalam sebuah pemerintahan.

Periode ketiga memiliki orientasi pada penghidupan kembali “critical inheritance”. Sedikit mirip dengan periode pertama, *critical inheritance* bertujuan untuk menghilangkan elemen konfusianisme yang sudah tidak relevan dan mengadopsi nilai konfusianisme untuk mendidik para kader politik Partai Komunis China. Sebenarnya, prinsip konfusianisme digunakan untuk mengkampanyekan perbaikan perilaku politik tidak etis yang terjadi antara anggota dan kader Partai Komunis China, seperti menerima suap, mencari keuntungan pribadi, menyalahgunakan kekuasaan jabatan politik, berbuat curang baik atasan maupun bawahan, spekulasi dan pencatutan.

Para sarjana China menggunakan konfusianisme untuk menyampaikan bahwa seorang pejabat politik harus menegakkan prinsip-prinsip etika politik dalam menjalankan urusan politik. Seperti yang sering dikatakan oleh Konfusius, “*To govern means to rectify. If you lead people with correctness, who will dare being incorrect?. When a prince’s personal conduct is correct, his governement is effective without the issuing of orders. If his personal conduct is incorrect, he may issue orders, but they will not be followed*” (Krieger & Trauzettel, 1991). Pernyataan tersebut bermaksud bahwa penguasa harus mencotuhkan etika pemimpin yang benar agar

didikuti dan dihormati oleh masyarakatnya. Dengan kata lain, pemerintah mulai menyadari bahwa pendidikan moral diperlukan untuk mencapai kelangsungan pemerintahan yang baik. Sehingga mereka mulai mengadopsi nilai konfusianisme yang menekankan pada hubungan antara standar hidup material dan moralitas sosial.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa para pemikir China masih memegang teguh prinsip Konfusiansime. Namun, tidak dapat digeneralisir bahwa nilai konfusianisme dapat diterima diseluruh daratan China. Kebanyakan Komunis China akan mencoba mengadopsi konsep Konfusianisme tertentu yang mereka yakini berguna untuk mengatasi kekurangan ideologi Maxist-Leninis.

Pada sebuah simposium tentang Konfusianisme yang diadakan di Singapura pada bulan September 1991, Chin Kuan-t'ao, seorang ilmuwan China daratan, mengemukakan gagasan "Konfusianisasi Marxisme di China kontemporer". T'ang I-chieh pun mengatakan bahwa ide marxisme haruslah berasimilasi dengan budaya China untuk mencapai kesinambungan antara budaya dan politik China (Krieger & Trauzettel, 1991: 238). Para pemikir menghidupkan kembali konfusianisme yang dikenal dengan "Confucian Renaissance" pada tahun 1987 saat Konferensi Studi Konfusian.

Feng Yu-lan, dalam bukunya yang berjudul *New History of Chinese Philosophy* yang dipublikasikan pada tahun 1980, memberikan indikasi makna dari "critical inheritance" yang diaplikasikan pada Konfusianisme. Dia mengatakan, "Pada saat ini, kita tentu tidak harus bergantung pada Konfusius dan Konfusianisme untuk mewujudkan kesatuan bangsa China. Bangsa China sekarang mengandalkan Marxisme-Leninisme dan pemikiran Mao Tse-tung untuk kesatuannya. Meski begitu, persatuan yang lebih besar dibangun atas dasar tradisi Tionghoa. Peran historis yang dimainkan oleh

Konfusius dan Konfusianisme dalam menyatukan bangsa China tidak dapat dan tidak boleh ditolak” (Yu-Lan, 2007).

Disamping kecenderungannya pada politik domestik, Mao Zedong juga menaruh perhatian besar pada dunia internasional. Dibalik isolasionisme yang diterapkan dalam masa kepemimpinannya, Mao Zedong justru dikenal sebagai “Sinterklas dari Asia” atas kemurahan hatinya yang senang membantu negara lain. Seperti contoh saat Perdana Menteri Zhou Enlai mengunjungi Somalia pada tahun 1964. Ia memaparkan delapan prinsip kerjasama dan bantuan China untuk negara-negara Afrika, yakni:

- 1) Mengutamakan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan;
- 2) Tidak pernah mengajukan persyaratan untuk meminta perlakuan istimewa;
- 3) Membantu meringankan beban yang ditanggung oleh negara penerima bantuan;
- 4) Membantu negara perlahan-lahan mencapai kemandirian dan perkembangan yang independen;
- 5) Menekankan para proyek-proyek bantuan yang membutuhkan investasi seminimal mungkin tetapi memberikan hasil sebanyak dan secepat mungkin;
- 6) Menyediakan peralatan dan material dengan kualitas terbaik;
- 7) Mengajarkan para teknisi negara penerima bantuan agar dapat menguasai teknik industri dan lainnya;
- 8) Para tenaga ahli China tidak diizinkan untuk mengajukan permintaan khusus atau menikmati perlakuan istimewa (Wicaksono, 2017: 176).

Delapan prinsip tersebut kemudian menjadi landasan hubungan baik antara China dan negara Afrika lainnya. Seperti yang dilakukan oleh Tanzania dan Zambia, kedua negara meminjam dana sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat kepada China dengan tanpa bunga untuk membangun rel kereta api. Kemudian pada tahun 1970

hingga 1976, proyek tersebut selesai digarap yang menghasilkan jalur rel kereta api sepanjang 1.700 km dari Kapri Mposhi di Zambia ke Dar-es-salaam di Tanzania (Wicaksono, 2017). Kebaikan China yang lain dapat dilihat ketika China mengalami kelaparan akibat *the Great Leap Forward*, China masih mengekspor bahan makanan ke luar negeri.

Selain delapan prinsip di atas, Mao Zedong juga mengungkapkan lima prinsip lainnya yang menjelaskan etika kerjasama China dan negara-negara lain secara umum. Kelima prinsip tersebut adalah saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, saling tidak agresi, tidak campur tangan dalam urusan internal, kesetaraan dan saling menguntungkan, dan kerjasama damai. Berdasarkan prinsip tersebut, dapat dibuktikan bahwa China tidak terlepas dari nilai-nilai konfusiansime dalam pola dan etika kerjasama yang dijalin (Yixin, 1981: 24-25).

## **b. Pemerintahan Era Deng Xiaoping**

Dalam masa peralihan antara Mao Zedong menuju Deng Xiaoping, China menghadapi masalah yang berat di bidang ekonomi dan budaya. Deng kemudian meminta pendapat para ilmuwan dan para ahli untuk memberikan solusi kebangkitan China. Solusi yang ditawarkan harus sesuai dengan kondisi China. Kemudian, Deng mengadopsi kembali premis awal tentang kenegaraan. Menurut tradisi China, tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan pertahanan negara atau dalam bahasa China disebut *Fuguo qiangbing*. Deng percaya bahwa tujuan tersebut dapat dicapai dengan berbagai cara termasuk kapitalis. Menurut Deng Xiaoping, “'kucing hitam' (kapitalisme) ataupun 'kucing putih' (sosialisme) tidaklah menjadi masalah, selama bisa 'menangkap tikus' (menyejahterakan rakyat), itu adalah 'kucing' (program ekonomi) yang terbaik” (Wicaksono,

2017: 401). Prinsip itulah yang mendasari kebijakan ekonomi lebih terbuka China pada era Deng Xiaoping.

Pemerintahan China pada tahun 1978 memutuskan untuk menghentikan kebijakan ekonomi yang berkiblat pada Soviet. Secara bertahap, China mereformasi ekonomi sesuai dengan prinsip pasar bebas, membuka perdagangan dan investasi dengan Barat, yang dikenal sebagai *Open door policy* (*kaifang zhengce*). Reformasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup masyarakat (Morrison, 2017: 3).

Deng tidak merombak banyak dari internal Partai Komunis China, ia hanya mengubah sistem ekonomi menjadi lebih terbuka. Pada tanggal 30 Maret 1979 memberikan pidato kunci sebagai pembatas dari demokratisasi yang semakin berkembang di China. Deng menegaskan bahwa sistem politik China masih sama, ia hanya membuka jalan bagi ekonomi yang lebih terbuka. Pembatas demokratisasi yang diungkapkan Deng Xiaoping dikenal dengan “Empat Prinsip Utama” yaitu jalur sosialisme, kediktatoran kaum proletar, kepemimpinan Partai komunis, dan Pemikiran Marxisme-Leninisme-Maoisme. Kemudian “Empat Prinsip Utama” tersebut dikenal sebagai “Teori Deng Xiaoping” (Moak & Lee, 2015: 91-92).

Selain itu, kebangkitan spiritual juga dikenal pada masa pemerintahan Deng Xiaoping setelah sebelumnya terkungkung dalam pemerintahan Mao Zedong. Mao Zedong sebagai penganut komunisme radikal mengatakan bahwa agama merupakan alat hegemoni kaum-kaum borjouis untuk menekan kaum proletar. Filsafat Hegel mengatakan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat. Sehingga syarat masuk partai Komunis China pada waktu itu haruslah atheis atau tidak memiliki agama. Pemikiran tersebut kemudian dipatahkan pada masa pemerintahan Deng Xiaoping. Ia mengatakan bahwa politik haruslah berjalan seiringan dengan spiritual yang baik dari pejabat

pemerintahan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan tindakan-tindakan tidak etis dalam pemerintahan seperti korupsi dan lain-lain.

Dari segi ekonomi, program kapitalisme Deng semakin terlihat ketika ia membentuk Zona Ekonomi Khusus pada 16 Mei 1980, untuk mengembangkan model kapitalisme di China. Zona Ekonomi Khusus dimaksudkan untuk mencapai industrialisasi China. Lima daerah telah ditetapkan sebagai Zona Ekonomi Khusus yaitu Shenzhen, Zhuhai, Shantou (Swatow), Xiamen, dan pulau Hainan (Wicaksono, 2017: 430).

Sementara itu, melalui pengukuran arus perdagangan dan investasi asing, integrasi China ke dalam ekonomi dunia telah meningkat secara substansial sebagai akibat dari *Open door policy*. Perdagangan China mencapai rata-rata 35% dari total pendapatan negara setiap tahun sejak pertengahan 1990an, lebih dari tiga kali lipat angka 13% pada tahun 1980. Menurut studi Bank Dunia, China telah menduduki peringkat ketiga teratas dalam hal keterbukaan perdagangan pada awal tahun 1990an (Moore, 2002: 2).

Reformasi ekonomi China juga bergerak pada sistem harga. Pada pemerintahan Mao Zedong, sistem harga ditentukan oleh pemerintah. Sementara pada bulan Oktober 1984 melalui Keputusan Komite Sentral untuk Reformasi Ekonomi, sistem harga mengalami perombakan yang tujuan utamanya yaitu untuk mengatur secara administratif harga yang ditetapkan secara bertahap dan mengizinkan pasar untuk menentukan harga. Jadi, China memberikan peluang kepada pasar untuk menentukan harga sebagai bahan pertimbangan perhitungan ekonomi dalam pemilihan input dan perencanaan output oleh perusahaan negara (Chow, 2004: 133).

Selain itu, Deng Xiaoping juga mengembangkan empat program modernisasi yaitu agrikultur, industri, pertahanan, dan teknologi. Secara garis besar,



modernisasi China telah terjadi pada masa pemerintahan Deng Xiaoping, terlepas dari empat program modernisasi tersebut. Melihat proses modernisasi yang terjadi, nilai konfusianisme mulai dihidupkan kembali. Prinsip konfusianisme berupa ketekunan, berhemat, kepercayaan, loyalitas, kesetiaan, harmoni, dan lainnya merupakan prinsip moral dasar bagi kerjasama manusia dan eksistensi sosial (Krieger & Trauzettel, 1991). Konfusianisme menjadi dasar bagi terciptanya menejemen moral manusia sebagai landasan kerjasama dan modernisasi. Selain itu, Deng Xiaoping juga menguatkan kembali prinsip “Sosialisme dengan karakteristik China” yang menganut empat prinsip yaitu pemerintahan satu partai, kepemilikan publik atas tanah, peran dominan untuk kepemilikan negara dan perencanaan ekonomi negara.

Kegagalan *the Great Leap Forward* menghasilkan kelaparan panjang akibat kacaunya sistem agraria. Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping menjalankan pemerintahan yang ditinggalkan Mao pada masa kegagalan tersebut. Keduanya sepakat untuk membentuk kebijakan baru untuk menggantikan kebijakan *the Great Leap Forward*. Berdasarkan pengalamannya mengelola perekonomian lokal, Deng mendorong terciptanya usaha-usaha kecil untuk memproduksi bahan makanan serta memperluas jaringan perekonomian dengan tujuan memperbaiki taraf kehidupan masyarakat. Pada tahun 1962, Deng mengeluarkan kebijakan privatisasi lahan sebagai kebijakan pengganti kolektivisasi lahan pertanian pada masa *the Great Leap Forward*. Privatisasi lahan bermaksud mengembalikan lahan pertanian kepada pemiliknya secara individu, sehingga mereka dapat mengelola hasil pertanian mereka sendiri. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Sebagai hasilnya, hasil panen mengalami peningkatan dan surplus.

### c. Pemerintahan Era Jiang Zemin

Setelah perubahan besar China seabad yang lalu, dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya Partai Komunis China yang dapat memimpin orang-orang China dalam mencapai kemenangan kemerdekaan nasional, pembebasan dan sosialisme rakyat, merintis jalan membangun sosialisme dengan karakteristik China, memperbarui bangsa, membuat negara makmur dan kuat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Jiang Zemin merumuskan tujuan pemerintahan yakni untuk mencapai modernisasi, membangun kesejahteraan, negara sosialis demokratis, dan mewujudkan pembaruan besar bangsa China dalam Kongres Partai ke-15 tahun 1997. Dalam sebuah wawancara dengan *Times of London* pada bulan Oktober 1999, Jiang kembali menekankan modernisasi untuk milenium baru China (Guo, 2003: 24).

Langkah awal dalam mencapai tujuan tersebut dimulai dari dalam partai. Pada Oktober 1998, Jiang mengkampanyekan tiga penekanan pada pendidikan, politik, dan kejujuran. Kemudian pada bulan Desember, Hu Jintao atas perintah Jiang Zemin secara resmi mengkampanyekan penekanan tersebut melalui siaran televisi. Ia meminta para kader partai untuk menuliskan "kritik diri" dan berpartisipasi dalam pertemuan kerja untuk membahas metode yang harus dilakukan untuk menjalankan tugas mereka. Para kader juga diminta untuk mengkampanyekan penekanan tersebut ke desa-desa, sebagai langkah pembaruan nasional.

Cita-cita modernisasi dan pembaruan nasional telah menjadi tujuan utama oleh para pemimpin China selama lebih dari satu abad. Mereka berkeyakinan untuk membuat China menjadi bangsa yang kaya dan berkuasa. Reformasi pasca Mao Zedong dengan membuka diri ke dunia luar telah menjadi langkah awal China untuk mencapai tujuan tersebut. Jiang Zemin sebagai pemimpin partai yang baru telah menetapkan bahwa modernisasi

dan demokratis akan menjadi tujuan China untuk milenium baru. Menjelang pertengahan abad berikutnya ketika Republik Rakyat China merayakan seratus tahun, program modernisasi akan selesai secara keseluruhan dan China akan menjadi negara sosialis yang makmur, kuat, demokratis dan budaya maju” (Guo, 2003: 25).

Jiang Zemin percaya bahwa ekonomi dan politik merupakan satu keterkaitan, sehingga perkembangan keduanya saling mempengaruhi. Ia menyadari bahwa untuk mengembangkan ekonomi China, ia harus memperbarui partai. Untuk itu, ia mengusung kebijakan *Three Represents* sebagai mekanisme pembaruan Partai Komunis China, serta sebagai interpretasi dari sosialisme dengan karakteristik China. Pada tanggal 25 Februari 2000, Jiang mengadakan pertemuan dengan para petinggi partai dan pejabat daerah untuk membahas *Three Represents* di Hotel Zhudao di Guangzhou, ibukota provinsi Guangdong (Wicaksono, 2017: 594).

Jiang memiliki tiga tujuan yang saling terkait dan *Three Represents* sebagai mekanisme pemersatu. Tujuan tersebut yaitu peradaban material, peradaban spiritual, dan peradaban politik. Ketiga tujuan tersebut salah satunya diambil dari budaya China kuno yaitu konfusianisme. Jiang menyadari bahwa budaya merupakan identitas China sehingga keberadaannya perlu dikembangkan untuk mencapai masyarakat China yang harmonis (Kuhn, 2010).

*Three Represents* tentu memiliki tiga unsur untuk mencapai masing-masing tujuan. Pertama, “kekuatan produktif yang maju” sebagai penafsiran lebih lanjut dari “kekuatan produktif” Maxis dengan cara yang cerdas. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan status dan memasukkan lapisan masyarakat dinamis, seperti manajer, pengusaha, dan pemilik bisnis swasta, ke dalam partai. *First Represents* merupakan tujuan utama partai dalam memperbarui China dengan cara mempromosikan pembangunan “peradaban material”. Jiang

melambangkan peradaban tersebut dengan inovasi sains dan teknologi. Saat ini, partai akan bergerak dalam bidang intelektual. Para intelektual yang mengalami kerugian selama Revolusi Kebudayaan Mao Zedong akan menjadi garda depan masyarakat baru China.

Kedua, “budaya maju” yang mencakup moralitas, perilaku masyarakat, karakteristik pribadi yang berpikiran tinggi, sikap sosial yang progresif, kepercayaan bersama, dan seni. Hal tersebut yang coba dicapai oleh partai untuk memperbarui China dengan tujuan. Budaya maju menandakan pembangunan “peradaban spiritual”. Jiang Zemin mengatakan bahwa cita-cita mulia, integritas moral, pendidikan yang lebih baik, kedisiplinan, dan budaya maju melambangkan kebanggaan baru dalam kemuliaan peradaban China, setelah penolakan mereka pada era Komunisme awal (ketika ajaran Konfusius dikecam sebagai “feodal”). Jiang Zemin, dengan akar budayanya yang kuat, berusaha mengembalikan nilai tradisional dan kebajikan tersebut, dan mengintegrasikannya dengan Marxisme.

Ketiga, “kepentingan mendasar sebagian besar masyarakat” dengan menjangkau semua masyarakat China. Hal tersebut diartikan sebagai memperluas jangkauan partai melampaui basis pekerja proletar dan petani tradisional dengan memasukkan para ilmuwan dan pengusaha. Para kaum kiri mengkritik kebijakan tersebut karena telah mengganti elemen utama teori pendirian partai<sup>2</sup> dengan konsep partai yang mencakup semua elit dari semua sektor masyarakat. Namun, sementara Jiang dikritik karena membuat Partai lebih inklusif dan kurang terobsesi kelas, ia merasa yakin bahwa para ilmuwan dan pengusaha adalah satu-satunya cara untuk memastikan keberlangsungan kepemimpinannya.

---

<sup>2</sup> Teori pendirian Partai komunis China menyebutkan bahwa anggota partai terdiri dari kelompok perjuangan kelas, garda depan kelas pekerja, dan kediktatoran proletariat.

Sebagai hasil dari *Three Represents*, pembaruan China semakin terlihat dari arah pembentukan sosialis demokratis, modernisasi partai, dan ekspansi ekonomi China. Inti dari sosialis demokratis menurut Jiang Zemin yakni “rakyat adalah penguasa negara”. Semua kebijakan pemerintah berkiblat pada kebutuhan rakyat, termasuk keterlibatan rakyat dalam partai maupun pemerintahan. Definisi China tentang demokrasi sosialis juga mengakui beberapa prinsip seperti “menjalankan kekuasaan negara, mengadakan pemilihan demokratis, membuat kebijakan negara dengan cara yang demokratis, melembagakan manajemen dan pengawasan yang demokratis, memastikan bahwa masyarakat menikmati hak dan kebebasan yang diberkahi oleh undang-undang, dan menghormati dan menjamin hak asasi manusia” (Guo, 2003: 10). Namun, sosialis demokratis yang diusung oleh Jiang Zemin lebih menjurus kepada nilai-nilai demokrasi murni, meskipun strukturnya tidak diterapkan sepenuhnya. Sosialis demokratis Jiang Zemin akan mengantarkan pada ekspansi ekonomi China menjadi lebih terbuka, bahkan mendekati kapitalis.

Sementara disisi lain, tokoh Konfusianisme yang berpengaruh pada awal abad kedua puluh seperti Sun Yat-sen, Kang Youwei, dan Liang Qichao berpendapat bahwa institusi demokratis seperti sistem parlementer, pemilihan, dan hak yang sama adalah kelanjutan dari dasar Konfusianisme (Bell, 2008: 28). Salah satu negara yang sukses menjalankan konfusianisme dan demokrasi adalah Korea Selatan. Tidak dipungkiri bahwa konfusianisme merupakan filsafat China yang menjadi acuan bagi negara Asia Timur lainnya.

Dalam menciptakan negara sosialis demokratis, China perlu untuk memperbarui partai. Salah satu pembaruan yang dilakukan tersirat pada *Third Represents* yaitu dengan memasukkan para ilmuwan dan pengusaha kedalam partai. Berdasarkan kebijakan tersebut, sebanyak 0,3 % dari kalangan pengusaha swasta menjadi anggota

Partai Komunis China. Hal tersebut menimbulkan pertentangan dari kaum kiri yang menganggap Jiang Zemin menyalahi aturan dasar Partai Komunis China.

Selain modernisasi partai, Jiang Zemin memiliki pandangan berbeda mengenai kepemilikan publik. Ia menganggap bahwa kepemilikan publik bukan serta merta kepemilikan negara. Sosialisme dapat diartikan melalui beragam jenis “kepemilikan” seperti koperasi, kolektif, kelompok pekerja, pemerintah daerah dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain, dan pada tingkat yang lebih rendah, seperti perusahaan swasta, individu, dan modal asing. Jiang memiliki pemikiran yang lebih terbuka tentang konsep tersebut dibandingkan dengan pemimpin China sebelumnya. Sejatinya, Jiang Zemin lebih mengarah pada keterbukaan ekonomi China dengan cita-citanya meningkatkan perekonomian global.

Berbicara seputar perkembangan ekonomi tidak terlepas dari ekspansi ekonomi. Dalam hal ini, China memiliki visi besar dalam mencapai perluasan ekonomi yang maksimal. Hal itu nampak saat kunjungan Presiden Clinton ke China pada tanggal 17 Juni 1998 yang mengindikasikan kerjasama ekspansi ekonomi China. Presiden Jiang Zemin melakukan pertemuan dengan Presiden Clinton dan menghasilkan kontrak dagang senilai 3,12 miliar USD. Kontrak tersebut memiliki tujuan terselubung, disamping untuk meningkatkan kerjasama kedua negara, China juga meminta bantuan kepada Amerika Serikat untuk mendukung China dalam kasus Taiwan. Sebagai balasannya, China akan mengajukan proposal keanggotaan dalam *World Trade Organization* (WTO). Sistem resiprokal yang dilancarkan kedua negara berujung pada kesepakatan yang menguntungkan keduanya (Ho, 2004). Sebagai hasil dari kesepakatan

tersebut, Presiden Jiang Zemin<sup>3</sup> pun mengaksesi masuknya China kedalam WTO pada 11 Desember 2001. China berharap keanggotaannya dengan WTO akan memastikan bahwa sistem ekonomi yang direformasi dan berorientasi pasar terus berkembang (BBC News, "*China Join the WTO-at Last*", 11 Desember 2001).

Selain ekspansi ekonomi, Jiang Zemin juga memiliki prinsip politik dalam hubungan politik luar negerinya. Pada tahun 1992, Presiden Jiang Zemin dan Menteri Luar Negeri Qian Qichen mengumumkan lima prinsip dasar dalam urusan luar negeri. China mengumumkan sikap baru dalam dunia politik melalui prinsip tersebut.

- 1) China dan negara-negara lain akan saling menghormati prinsip kedaulatan dan integritas teritorial. Tidak akan ada yang saling mendominasi ataupun menjadi pemimpin dunia. Masyarakat dunia dipahami sebagai sekelompok bangsa yang diperlakukan sama, baik besar maupun kecil, kuat atau lemah. Atas dasar saling menghormati inilah hubungan baik dapat terbentuk.
- 2) China dan negara-negara lain akan menunjukkan sikap tidak bermusuhan. China tidak ingin menyerang negara manapun, juga tidak akan membiarkan adanya agresi terhadap dirinya sendiri oleh negara lain. Bangsa dapat hidup bersama tanpa ancaman militer.
- 3) China dan negara-negara lain akan menunjukkan sikap saling non-intervensi dalam urusan internal negara. Tidak ada negara atau kelompok negara yang dapat memaksakan pandangan, prioritas, atau nilai pada negara lain, dan juga tidak dapat menerapkan kebijakan atau tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. China tidak ingin mengganggu urusan negara lain, juga tidak akan membiarkan negara lain mengganggu masalah dalam negeri China.

---

<sup>3</sup> Presiden Jiang Zemin menjabat sebagai Presiden China pada tahun 1993 hingga tahun 2003.

- 4) Hubungan antara China dan negara-negara lain akan dilakukan atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan. China tidak ingin diperlakukan sebagai mitra junior atau negara satelit.
- 5) China dan negara-negara lain akan hidup berdampingan secara damai. Setiap negara memiliki perbedaan nilai, agama, ideologi, institusi, dan cara hidup, namun dapat hidup berdampingan dengan damai. Negara tidak perlu berseragam dalam ideologi, institusi, agama, cara hidup, atau jenis pemerintahan. Negara harus diizinkan untuk melestarikan ideologi dan institusi mereka sendiri atau membuat perubahan atas inisiatif mereka sendiri (Ho, 2004: 155-156).

Melalui lima prinsip tersebut, China berupaya untuk memperkenalkan sikap barunya dalam dunia internasional. China bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain dan melihat China sebagai negara yang damai. Sehingga dapat terjalin hubungan yang positif dengan negara-negara lain.

#### **d. Pemerintahan Era Hu Jintao**

Setelah pemerintahan Jiang Zemin berakhir, Hu Jintao menggantikan posisinya menjadi Presiden China selama dua periode pada tahun 2003 hingga 2013. Pemerintahan Hu Jintao ditandai dengan Olimpiade Beijing 2008 dan Shanghai Expo pada tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi yang solid dan modernisasi infrastruktur China terjadi pada masa pemerintahan Hu Jintao. Namun ia juga disalahkan atas korupsi yang meluas hingga menjerat keluarga Perdana Menteri Wen Jiabao (Al Jazeera, "China: Xi Jinping Cements Status as Leader", 25 Oktober 2017).

Selain itu, China juga terkena dampak krisis keuangan global pada tahun 2008. Perdana Menteri Wen Jiabao dalam sebuah pidato *World Economic Forum* mengatakan bahwa krisis keuangan global saat ini telah berdampak cukup besar terhadap ekonomi China. Jumlah



pengangguran di daerah pedesaan pun meningkat. Perekonomian China tumbuh sebesar 9% di tahun 2008, namun hanya sebesar 6,8% pada kuartal terakhir di tahun yang sama. Hal itu terjadi karena permintaan luar negeri untuk ekspor China menyusut. Krisis keuangan global memberikan dampak yang nyata pada laju ekspor China. Namun, Perdana Menteri Wen Jiabao menambahkan bahwa ekonomi China sedang dalam kondisi yang baik secara keseluruhan (BBC News, “*Crisis Has Hit China’s Economy*”, 28 Januari 2009).

Hu menyadari bahwa laju ekonomi yang semakin pesat akan berimplikasi pada politik China. Keterbukaan ekonomi dikhawatirkan tidak dapat terkontrol oleh pemerintah, serta legitimasi partai Komunis lambat laun akan memudar. Sehingga ia menciptakan konsep “masyarakat sosialis yang harmoni” dengan menggabungkan kelajuan ekonomi dengan prinsip sosialisme. Dalam hal ini, pemerintah mengawal laju ekonomi dengan seksama sehingga dapat berjalan seimbang dengan prinsip sosialisme berupa pemerataan. Untuk itu, Hu Jintao dan Wen Jiabao rajin mengunjungi desa-desa untuk memantau pemerataan ekonomi.

Konsep masyarakat yang harmoni merupakan interpretasi Hu Jintao akan nilai konfusianisme China. Ia kemudian menginstruksikan kader partai China untuk membangun konsep tersebut. Menggemakan tema-tema Konfusianisme, Hu mengatakan bahwa China harus mempromosikan nilai kejujuran dan kesatuan, serta menjalin hubungan yang lebih erat antara masyarakat dan pemerintah. Pada bulan Maret 2007, perdana menteri Wen Jiabao menambahkan rujukan untuk menunjang ketercapaian tersebut dengan tradisi China. Ia mengatakan, “Dari Konfusius ke Sun Yat-sen, budaya tradisional bangsa China memiliki banyak elemen berharga, banyak aspek positif mengenai sifat rakyat dan demokrasi. Misalnya, menekankan cinta dan kemanusiaan, komunitas, keharmonisan di antara sudut

pandang yang berbeda, dan berbagi dunia yang sama atau *tian xia wei gong* (Bell, 2008: 23)”.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam sebuah ringkasan resmi yang diterbitkan oleh Presiden Hu Jintao pada tahun 2009. Ringkasan tersebut mencerminkan pandangan kontemporer para pembuat kebijakan China dan Partai Komunis China. Presiden Hu berfokus pada lima hal yaitu transformasi mendalam, dunia yang harmonis, pembangunan bersama, tanggung jawab bersama dan keterlibatan aktif. Gagasan utama prinsip tersebut adalah bahwa dunia telah mengalami perubahan besar dan masa depan serta takdir China terkait erat dengan masa depan dunia luar. Oleh karena itu, China seharusnya tidak hanya secara aktif mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat internasional, tetapi juga mencapai perkembangan bersama serta berkontribusi lebih dan bertanggung jawab dalam membangun dunia yang relatif harmonis. Hal ini dianggap mengartikulasikan persepsi China yang paling positif tentang masyarakat internasional dan hubungan China dengan hal itu, sejak tahun 1840 (Liqun, 2010: 23).

Dalam mencapai masyarakat yang harmoni, pada periode kedua Hu Jintao, ia memperkenalkan konsep *community of common destiny* melalui laporan Kongres Nasional Partai Komunis China ke-17. Konsep tersebut digunakan untuk menjelaskan hubungan khusus lintas selat antara China daratan dan Taiwan, bahwa kedua negara memiliki tanggungjawab bersama dalam satu kawasan China. Hu Jintao mengetatkan isolasi Taiwan ke dunia internasional. Ia menekankan implementasi “Satu China” terhadap Taiwan dalam segala urusan luar negerinya.

Selain itu, *community of common destiny* juga ditunjukkan untuk kebijakan luar negeri China. *Community of common destiny* dalam kebijakan luar negeri China bermaksud untuk membentuk komunitas kepentingan, komunitas pembangunan dan tanggung jawab, dan

komunitas takdir bersama dengan negara-negara perbatasan (Swaine, t.thn: 6). Namun, penerapan konsep tersebut pada masa pemerintahan Hu Jintao dapat dikatakan belum maksimal. Hal itu disebabkan oleh fokus Hu Jintao menangani masalah domestiknya dengan Taiwan.

Selayaknya pemimpin-pemimpin sebelumnya, Hu Jintao pun memiliki jalan yang realistis untuk mencapai tujuannya yaitu dengan “Konsep pengembangan ilmu pengetahuan”. Ia mencoba menyadarkan masyarakat China bahwa untuk mencapai kesejahteraan, China harus menerapkan pembangunan yang komprehensif. Disamping bidang intelektual, Hu Jintao berupaya untuk meningkatkan moralitas bangsa. Pada tahun 2006, ia mengkampanyekan “Delapan Hal Utama dan Tercela” yaitu daftar tindakan moral yang harus dijadikan teladan:

- 1) Cinta negara adalah hal utama, membahayakan negara adalah hal tercela.
- 2) Melayani rakyat adalah hal utama, mengkhianati rakyat adalah hal tercela.
- 3) Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan adalah hal utama, kebodohan dan ketidak-pedulian adalah hal tercela.
- 4) Rajin bekerja tanpa kenal lelah adalah hal utama, kemalasan adalah hal tercela.
- 5) Bersatu padu dan kerjasama adalah hal utama, memperdaya orang lain demi keuntungan pribadi adalah hal tercela.
- 6) Jujur dan dapat dipercaya adalah hal utama, mengutamakan keuntungan pribadi dengan cara tidak jujur adalah hal tercela.
- 7) Disiplin dan patuh kepada hukum adalah hal utama, melanggar hukum dan menimbulkan kekacauan adalah hal tercela.
- 8) Hidup sederhana dan bekerja keras adalah hal utama, berfoya-foya dalam kesenangan adalah hal tercela (Wicaksono, 2017: 629-630).

Delapan prinsip tersebut menjadi acuan untuk mencapai kebangkitan nasional China. Prinsip moral dibutuhkan untuk mendidik sumber daya yang baik dan beretika, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi negara atas tindakan politik yang tidak etis. Selain itu, delapan prinsip juga memiliki tujuan untuk mengikat bangsa China secara filosofis.

#### **e. Pemerintahan Era Xi Jinping**

Dalam Kongres Nasional Kongres Nasional Partai Komunis China ke-18 pada tahun 2012, China melantik Presiden Xi Jinping sebagai Presiden Hu Jintao. Dalam pidatonya, Xi Jinping mengemukakan konsep “Mimpi China” yang akan dicapai selama masa pemerintahannya. Menurut beberapa surat kabar internasional, mimpi China sering dikaitkan dengan kebangkitan ide Sinosentrisme.

Mimpi China menurut Presiden Xi Jinping merujuk kepada aspirasi kolektif tentang “Kebangkitan Besar Bangsa China” dengan capaian produktivitas tinggi, kesehatan, dan hidup bahagia. Lebih jelas Xi menegaskan bahwa Mimpi China merupakan mimpi seluruh masyarakat China yang hanya dapat dicapai melalui sosialisme dengan ciri khas China. Secara internasional, Mimpi China dapat dilihat sebagai lanjutan dari strategi pembangunan damai China. Hal itu disampaikan oleh Presiden Xi Jinping, bahwa “Kita bangsa China mencintai perdamaian. Tidak peduli seberapa kuatnya China nanti, China tidak akan pernah menginginkan hegemoni atau ekspansi. Itu tidak akan pernah menimbulkan penderitaan masa lalunya pada negara lain” (Das, 2016).

Pengembalian masa kejayaan China berkaitan erat dengan sumbangsih konfusianisme dalam peradaban China. Dahulu bangsa China dikenal dengan bangsa beradab yang menjunjung tinggi ilmu-ilmu filsafat. Xi mencoba untuk mengembalikan kejayaan tersebut beriringan dengan kebangkitan ekonomi China. Hal itu yang disebut dengan Kebangkitan Besar Bangsa China.

Langkah politik yang diambil China dalam mencapai Mimpi China yaitu dengan memperkuat diplomasi perifer, menegaskan komitmen China dalam kerjasama multilateral, serta sikap politik yang tegas. Diplomasi perifer telah berjalan efektif dengan negara-negara berkembang khususnya bagian Afrika. Strategi diplomasi perifer memegang prinsip “biaya rendah, resiko rendah, dan keuntungan yang tinggi” (Wicaksono, 2017: 667). Filosofi diplomasi China bersifat pasifis, bahwa “kedamaian adalah hal yang paling berharga”, serta menggunakan pendekatan “kemurahan hati akan memberikan keuntungan yang lebih besar”. Untuk itulah, ia menysasar kerjasama dengan negara-negara berkembang untuk menguatkan integrasi kerjasama ekonomi. Sebagai hasilnya, China mensponsori pembangunan jalur kereta Trans-Eurasia, Asia Tengah, dan Pan-Asia yang nantinya akan menghubungkan berbagai negara berkembang di Asia dan Eropa.

Sementara dari segi kerjasama multilateral, China berkomitmen untuk meningkatkan perannya dalam badan PBB dan BRICS (*Brazil, Russia, India, China, and South Africa*). Dalam BRICS, China membentuk *BRICS Development Bank*. Selain itu, China juga meningkatkan kerjasamanya dengan negara-negara Asia Tenggara dengan membentuk berbagai forum ASEAN+China.

Berbagai hal dilakukan oleh Xi Jinping dalam mencapai Mimpi China, termasuk kebijakan “New Normal” untuk menunjang tercapainya target pertumbuhan ekonomi China. Pada tahun 2014, IMF mendeklarasikan bahwa ekonomi China telah melampaui Amerika Serikat melalui perhitungan keseimbangan daya beli. “New Normal” diindikasikan untuk mereformasi ekonomi China secara keseluruhan, sebelum kecepatan pertumbuhan semakin tinggi. Selama tiga dekade, pertumbuhan ekonomi China rata-rata hampir 10% per tahun namun berimplikasi pada lingkungan dan struktur sosial yang sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Presiden

Xi menargetkan pertumbuhan ekonomi China pada angka 7%. Target tersebut lebih rendah dari pertumbuhan China sebanyak 10% selama tiga dekade. Perdana Menteri Li Keqiang menambahkan bahwa reformasi ekonomi akan menjadi stimulus untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Bahkan jika kinerjanya kurang baik pada target 7,5% untuk tahun 2014, ekonomi China masih pada tingkat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi daripada negara maju manapun (BBC News, “*Has President Xi Jinping Achieved His China Dream?*”, 19 Desember 2014).

Dalam kebijakan luar negerinya, Xi Jinping mengkampanyekan “*community of common destiny*” dalam laporan Kongres Nasional Partai Komunis China ke-18 pada tahun 2012. *Community of common destiny* bertujuan untuk berbagi solusi dan problematika secara bersama-sama dengan negara lain. Semangat *community of common destiny* mengarah pada pembentukan dunia bersama berdasarkan prinsip *tian xia wei gong*. Penguatan pemahaman akan takdir bersama antar negara juga terus digencarkan oleh China, agar negara memiliki tanggung jawab bersama untuk bersatu mengatasi masalah, mengupayakan pembangunan bersama, dan perdamaian abadi (Chinadaily.com.cn, “*A to Z of China’s Diplomacy Under Xi’s Leadership*”, 29 Juni 2016).

Gagasan *community of common destiny* kemudian dituangkan dalam proyek *One Belt One Road* (OBOR). OBOR bertujuan untuk mengakomodir kepentingan negara-negara berkembang dalam menangani masalah pembangunan yang tidak merata. Selain itu, OBOR juga menjadi bentuk penerapan nilai sosialisme dengan karakteristik China. (Crienglish.com, “*Xi Promotes Creation of a Community of Common Destiny in Asia at Boao*”, 28 Maret 2015).